

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini peneliti akan memaparkan hasil temuan yang diperoleh di lapangan pada saat penelitian. Sesuai dengan judul penelitian ini yakni analisis kemenangan Ridho Ficardho dan Bakhtiar Basri dalam Pemilihan Gubernur Lampung 2014.

A. Proses Pemilihan Kepala Daerah Lampung 2014

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 mengenai penyelenggara pemilihan umum. Keterlibatan berbagai pihak seperti KPU dan masyarakat sangat menonjol karena dalam pembentukan panitia persiapan sampai ditingkat KPPS semua melibatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pilkada. Dalam penyusunan tata tertib pilkada KPU Lampung memiliki peran penting dalam berbagai proses dari pembukaan calon sampai dengan rapat pleno hasil suara setiap calon. Jumlah anggota KPU menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 Pasal 16 (1C) dan SK KPU No. 677 Pasal 20 adalah lima (5) orang Komisioner yang terdiri dari ketua yang merangkap sebagai anggota dan empat orang anggota yang lain.

A.1 Tahapan Pilkada

Kegiatan pilkada langsung dilaksanakan dua tahap, yakni masa persiapan dan tahap pelaksanaan. Masing – masing tahap dilakukan berbagai kegiatan yang merupakan proses Pilkada langsung. Pelaksanaan tahapan kegiatan tidak dapat

melompat – lompat. Dalam pasal 65 ayat (2) disebutkan kegiatan – kegiatan yang tercangkup dalam masa persiapan, yakni : (i) pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan; (ii) Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah; (iii) Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penataan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah; (iv) Pembentukan panitia pengawas, PPK, PPS, dan KPPS; (v) Pembentukan dan pendaftaran pemantau¹.

Tabel 5.1
Tahap – Tahap Pelaksanaan Pilkada

No	Kegiatan	Pem- Prov	DPRD	KPUD	Par - pol	PANWAS	MUSPIDA	Masyarakat
1	Persiapan				v			
	1. Surat Pemberitahuan pilkada		v					
	2. penyusunan aturan			v				
	3. pembentukan Panwas		v					
	4. Sosialisasi			v				
	5. Penyusunan Anggaran	v						
	6. Pemutakhiran daftar pemilih	v		v				
2	Pelaksanaan							
	1. Penetapan Daftar Pemilih	v		v		v		
	2. Pendaftaran dan penetapan calon			v	v	v		
	3. Kampanye			v	v	v	v	V
	4. pemungutan suara			v		v		V
	5. Penghitungan suara			v		v		
	6. Penetapan pasangan calon			v		v		
	7. penyelesaian penyelesaian	v		v		v	v	
	8. pengesahan dan pelantikan	v	v				v	

Dalam kegiatan masa persiapan, keterlibatan rakyat sangat menonjol dalam pembentukan panitia pengawas, PPK, PPS, dan KPPS. Rakyat memiliki akses untuk memantau melalui mekanisme uji publik dan mendaftarkan diri sebagai anggota panitia pengawas, PPK, PPS, dan KPPS,. Sementara itu, tahap pelaksanaan terdiri dari 6 kegiatan, yang masing – masing merupakan rangkaian

¹ J. Kaloh. 2007. Mencari Bentuk Otonomi daerah. Rineka Cipta. Jakarta Hal 87

yang saling terkait. Sesuai dengan pasal 65 ayat (3) tahap pelaksanaan pilkada meliputi : (i) Penetapan daftar pemilih; (ii) pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah; (iii) Kampanye; (iv) Pemungutan suara; (v) Penghitungan suara; (vi) Penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan.

Dari 6 tahapan kegiatan pelaksanaan tersebut, keterlibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat sebagai pemilih dan pemantau terlihat dalam penetapan daftar pemilih, kampanye, pencalonan, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Namun persyaratan pilkada langsung akan lebih lengkap apabila rakyat atau warga menggunakan hak pilih aktif untuk memilih langsung kepala daerah dan wakil kepala daerah. Keterlibat tersebut tidak hanya menjadi calon namun juga mengawasi proses yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Mengingat bahwa KPU Daerah diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka rencana kegiatan tahap pelaksanaan yang dilakukan KPUD di Lampung sebagaimana terurai berikut ini.

A.2 Tahap Persiapan

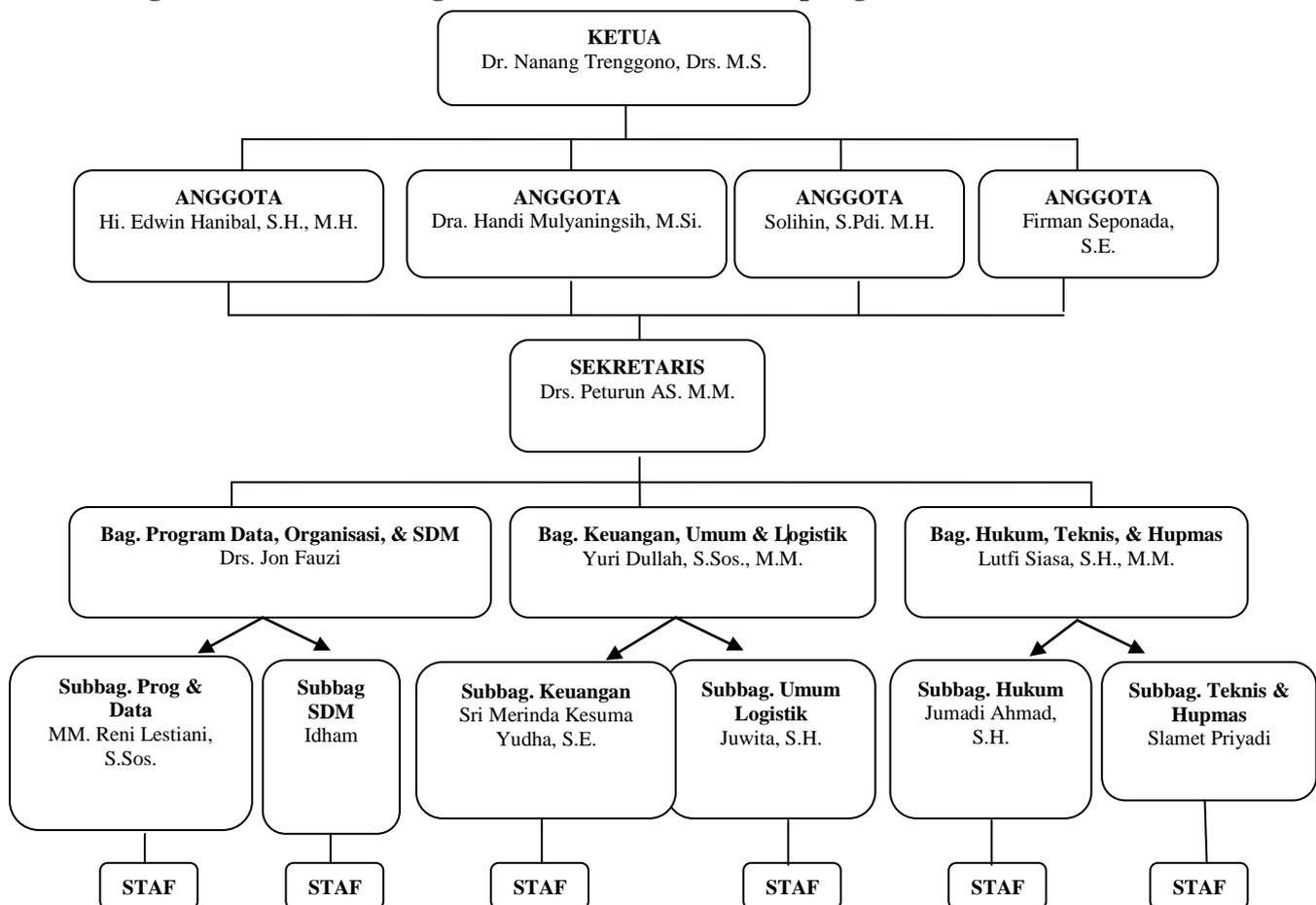
Pelaksanaan tugas dan wewenang KPU, dilakukan pembagian lebih dari satu divisi, setiap anggota dapat menjadi anggota lebih dari satu divisi, tetapi setiap anggota menjadi penanggungjawab setiap divisi. Sedangkan urusan keuangan KPU menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang kemudian ditegaskan kembali dengan Surat Keputusan KPU No. 677 Tahun 2003 pasal 29 (3) “KPU Provinsi bertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN kepada KPU berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 4 berbunyi “KPU Provinsi melaporkan dan mempertanggungjawabkan keuangan yang bersumber dari APBD kepada gubernur berdasarkan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut : (a) Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum; (b) Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum; (b) Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS; (c) Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan; (d) Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I, dan DPRD II; (e) Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum dan memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 66 tentang Tugas dan Wewenang KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan daerah dan wakil kepada daerah adalah, (a) merencanakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, (b) menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam perundang-undangan, (c) mengkoordinasikan,

menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, (d) menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, (e) meneliti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon, (f) meneliti persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan, (g) menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan, (h) menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye, (i) mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye, (j) menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, (k) melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, (l) melaksanakan tugas dan wewenang yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, dan (m) menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan hasil audit.

Bagan. 5.1. Struktur Organisasi KPU Provinsi Lampung Tahun 2013

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, 2014

Dr. Nanang Trenggo. M.S. dan 4 anggota komisioner lainnya seharusnya telah mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2013 lalu dan harusnya dilakukan pemilihan komisioner baru. Mengingat agenda pemilukada sudah sangat dekat, Mendagri memperpanjang tugas dan mandatnya hingga Juli 2014. Terkait dengan jadwal penyelenggaraan pemilukada gubernur, proses penetapan terdapat tarik menarik antara pemerintah provinsi Lampung dengan KPU Lampung. Pihak Pemerintah Provinsi semula bersikeras bahwa pemilu tidak mungkin diselenggarakan pada awal 2014 mengingat masa jabatan Gubernur Sjachroedin Z.P habis pada bulan 2 Juni 2014 dan anggaran pemerintah untuk pemilukada baru akan di keluarkan setelah

anggaran belanja di tahun 2014 ini. Dilain pihak KPU Lampung juga memiliki argumen bahwa pemilukada yang awalnya di agendakan pada tahun 2013 tidak dapat berjalan dengan harapan karena dana pelaksanaan pilkada tidak dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang seharusnya pemerintah daerah bisa melakukan APBD Perubahan untuk menganggarkan pelaksanaan pilkada ini melihat masa jabatan gubernur Sjachroedin ZP telah menjabat 5 tahun dari 2009 – 2013.

Pemerintah Provinsi pun tidak memberikan APBD pilkada pada tahun 2013 sehingga KPU melaksanakan pilkada berbarengan dengan pemilu legislatif April 2014. Lampung merupakan satu-satunya daerah yang belum mau memajukan pilkada ke 2013 padahal Mendagri Gamawan Fauzi menegaskan, bahwa bagi 43 kepala daerah yang turun jabatan pada 2014 agar diselenggarakan pada 2013. Hal itu mengacu pada ketentuan UU No. 12/2008 tentang Perubahan Kedua UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah namun Mendagri tidak terlalu mempersoalkan kondisi ini, mengingat Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyanggupi bisa menggelar pilkada Lampung berbarengan dengan Pemilu 2014. Selain itu juga anggaran pilgub yang awalnya diharapkan KPU turun sebelum oktober 2013 itupun tidak terealisasikan sehingga pelaksanaan menunggu adanya biaya untuk pelaksanaan pilkada ini dan bisa menghemat anggaran untuk pilkada di langsungkan bersama dengan pilgub namun ada hal positif juga yang dapat diambil jika pilgub dan pileg dilakukan bersama seperti masyarakat bisa melihat kesinergisan visi misi calon dan partai politik pengusungnya.²

² Wawancara dilakukan pada 27 November 2014 Subbag. Teknis dan Hupmas Slamet Priyadi

A.3 Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan ini terdiri dari penentuan daftar pemilih tetap sampai dengan tahapan pencalonan dan penetapan calon Kepala daerah / wakil kepala daerah merupakan tahap kegiatan di mana partai politik mengajukan calon kepala daerah, kemudia KPUD melakukan penelitian terhadap calon yang di ajukan. Tahapan ini memberikan kesempatan masyarakat untuk memberikan tanggapan dan KPUD mengadakan tindak lanjut atas tanggapan masyarakat terhadap hasil penelitian calon.

Dalam memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada Lampung KPU telah melakukan pemutakhiran data pemilih tetap (DPT) yang merupakan hal penting dalam proses pemilihan gubernur Lampung tahun 2014 ini. Berdasarkan data yang diperoleh oleh KPU Lampung jumlah pemilih dapat tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.2
Rekapitulasi jumlah pemilih dan TPS di Provinsi Lampung 2014

No.	KABUPATEN/KOTA	Daftar Pemilih Tetap (DPT)			TPS
		Laki – Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Banda Lampung	324.456	317.315	641.771	1.639
2	Metro	55.210	56.028	111.238	423
3	Lampung Selatan	356.250	340.811	697.061	1.856
4	Lampung tengah	460.826	437.749	898.575	2.455
5	Lampung Utara	228.311	224.960	453.271	1.266
6	Lampung Timur	397.439	382.111	779.550	1.922
7	Pringsewu	160.355	154.196	314.551	1.002
8	Pesawaran	162.799	154.024	316.823	1.100
9	Tanggamus	239.038	221.887	460.925	1.581
10	Waykanan	171.416	160.843	332.259	833
11	Tulang Bawang	148.497	135.883	284.380	778
12	Tulangbawang Barat	99.501	96.409	195.910	553
13	Mesuji	75.205	68.751	143.956	391
14	Lampung Barat	167.777	150.357	318.134	858
JUMLAH				5.948.404	16.657

Sumber : data diolah dari KPU Provinsi 2014

Tahap selanjutnya yaitu tahap penetapan calon gubernur Lampung yang merupakan tahap yang sangat ditunggu – tunggu oleh masyarakat untuk melihat siapa saja sosok yang mencalonkan dirinya dalam pilkada kali ini. Dalam tahap ini partai politik, KPU Lampung, panitia pengawas, dan masyarakat memiliki peran aktif dalam pilkada Lampung kali ini karena partai politik merupakan salah satu penentu pemenangan calon dalam pilkada Lampung ini. Setelah KPU melakukan verifikasi berkas calon yang masuk ke daftar bakal calon gubernur dan wakil gubernur Lampung ke KPU pada tanggal 25 Februari 2014 keluarlah 5 nama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur baik jalur perseorangan maupun partai seperti terlihat pada tabel di bawah ini setelah pasangan Amalsyah Tarmizi dan Gunadi Ibrahim mengundurkan diri pada tanggal 23 Januari 2014.

Tabel 5.3
Daftar Nama calon Gubernur dan wakil Gubernur Lampung tahun 2014

No Urut.	Nama Calon	Partai Pendukung
1.	Berlian Tihan dan Mukhlis Basri	PDI-P, PPP dan PKB serta 5 partai Non- Parlemen
2.	Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri	Demokrat, PKS, PKPB dan PDK
3.	Herman HN dan Zainudin Hasan	PAN serta 15 partai non parlemen
4.	Alzier Dianis Thabrani dan Lukman Hakim	Golkar dan Hanura

Sumber : data diolah dari KPU Lampung

Dilihat dari data diatas KPU Lampung mengeluarkan 4 nama calon yang akan dipilih pada tanggal 9 April 2014 yang berbarengan dengan pemilihan legislatif. Setelah KPU Lampung menetapkan empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Lampung yang berhak mengikuti pilgub, KPU terus merapatkan barisan. Wujudnya, KPU melakukan konsolidasi bersama

14 KPU kabupaten/kota se-Lampung. Adapun agenda pertemuan di antaranya membahas soal jadwal kampanye pilgub dan pileg yang berlangsung bersamaan. Ketua Pokja Kampanye Pilgub Lampung Edwin Hanibal menjelaskan,

A.4 Tahap Kampanye

Kegiatan kampanye merupakan tahapan yang di berikan kepada semua pasangan calon untuk menjual visi, misi, dan program, dan meyakinkan pemilih agar terpicat pada pasangan calon yang bersangkutan. Dalam tahap kampanye ini *stakeholdres* yang berperan adalah KPUD, Partai Politik, masyarakat, panitia pengawas, pemerintah, dan muspida. Sebelum dilaksanakannya kampanye, KPUD melakukan pembahasan jadwal kampanye dengan tim sukses semua pasangan calon, dan mengadakan koordinasi dengan pemerintah Provinsi, DPRD, Aparat Kepolisian, dan Panwas Pilkada Lampung. Kampanye Pilgub berlangsung 23 Maret hingga 5 April. Sedangkan untuk kampanye pemilu legislatif dimulai sebelumnya, yakni pada 16 Maret 2014. Seperti terlihat pada tabel jadwal kampanye calon gubernur dan wakil gubernur Lampung.

Tabel 5.4
Jadwal Kampanye calon Gubernur dan wakil gubernur Lampung

No.	Pasangan calon	Penyampaian visi misi	Area 1	Area 2	Area 3	Area 4	Debat Kandidat
1	Berlian tihang - Mukhlis Basri		24-Mar-14	27-Mar-14	29-Mar-14	02-Apr-14	
2	M Ridho Ficardo - Bachtiar Basri	23-Mar-14	02-Apr-14	24-Mar-14	27-Mar-14	29-Mar-14	05-Apr-14
3	Herman HN - Zainudin Hasan		29-Mar-14	02-Apr-14	24-Mar-14	27-Mar-14	
4	Alzier Dianis T - Lukman Hakim		27-Mar-14	29-Mar-14	02-Apr-14	24-Mar-14	

Sumber : data diolah dari KPU Lampung

Keterangan Area :

Area 1 : Bandar Lampung dan Lampung Selatan

Area 2 : Pesawaran, Metro, Tanggamus, Pringsewu, dan Lampung Barat

Area 3 : Waykanan, Lampung Utara, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji

Area 4 : Lampung tengah dan Lampung timur

Dalam masa kampanye ini setiap calon boleh menyampaikan visi – misinya untuk mencari suara dukungan terbanyak dari masyarakat namun tetap sesuai dengan peraturan dan rambu - rambu yang disampaikan oleh KPU Lampung. Proses kampanye ini hanya melibatkan tim sukses pasangan setiap calon untuk melaksanakan proses kampanye ini dan disini tugas Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Lampung menjalankan fungsi sebagai pengontrol kerja KPU Lampung dan mengawasi tindakan kecurangan yang dilakukan oleh calon gubernur dan wakil gubernur Lampung. BAWASLU Lampung juga dapat memberikan sanksi tegas terhadap lembaga – lembaga pelaksana pilkada ini sebagai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 mengenai penyelenggara pemilihan umum.

A.5 Tahap Pemungutan Suara

Pemungutan suara merupakan inti pelaksanaan Pemilu. Persiapan berbulan – bulan, tenaga, pikiran, waktu, dan biaya telah di curahkan untuk kelancaran dan kesuksesan pemungutan suara. Menurut kriteria demokrasi, proses pemungutan suara harus langsung, umum, bebas, dan rahasia. Integritas pelaksanaan pemungutan suara sangat penting dan mendasar karena merupakan jantung dari pelaksanaan pilkada. Lewat proses pemungutan suara di uji pelaksanaan asas langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil. Pelaksanaan asas ini merupakan syarat mutlak

bagi pemilu yang berlangsung secara *fair* dan demokratis, serta diakui dunia internasional.

Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur berhasil terlaksana meskipun ada sedikit hambatan dalam proses nya namun berjalan dinamis pada tanggal 9 April 2014 yang bersamaan pelaksanaannya bersama pemilihan legislatif tersebut berjalan lancar dan mengeluarkan hasil pasangan M Ridho Ficardho dan Bachtiar Basri terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Lampung periode 2014 – 2019. Pasangan ini berhasil unggul dengan mengalahkan 3 pasangan lain yang merupakan aktor politisi yang cukup berpengalaman, hasil dari pemilihan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.5
Hasil Rekapitulasi perolehan suara

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah perolehan suara
1	Ir. H Berlian Tihan, MM dan Drs. H Mukhlis Basri	606.566
2	M Ridho Ficardo M.Si dan Bakhtiar Basri, SH, MM	1.816.533
3	Drs. Herman HN, MM dan Dr. H Zainudin Hasan MM. MH	1.342.763
4	M. Alzier Dianis T, SE dan H Lukman Hakim, SH, MM	288.276
	Total	4.054.134

Sumber : Data Diolah dari KPU

B. Strategi Pemenangan pasangan kandidat

B.1 Strategi Pra kampanye

Strategi pra kampanye dilakukan oleh pasangan Ridho Ficardho dan Bakhtiar Basri pada saat sebelum dilakukan penetapan calon oleh KPU Provinsi. Dari hasil wawancara yang dilakukan pasangan Ridho Ficardho dan Bakhtiar Basri pada masa pra kampanye melakukan 4 strateginya yaitu (i) strategi membangun koalisi, (ii) strategi mobilisasi dana, (iii) strategi

jaringan pendukung dan (iv) Strategi menyusun pesan – pesan kampanye selengkapnya masing – masing strategi dapat diuraikan sebagai berikut:

B.1.1 Strategi membangun koalisi

Sebuah koalisi bisa berarti sebuah gabungan beberapa lembaga yang dibentuk untuk tujuan tertentu. Koalisi bisa juga merujuk pada sekelompok orang/warganegara yang bergabung karena tujuan yang serupa dan koalisi antarpol dalam rangka menentukan calon kepala daerah tak boleh hanya didasarkan hitung-hitungan kepentingan politik jangka pendek. Idealnya, koalisi parpol dibangun berdasarkan kesamaan platform ideologi dan biasanya dalam membangun koalisi terjadi kontrak politik, kontrak politik tidak hanya berisi kewajiban dan hak parpol dalam koalisi, tetapi yang lebih penting adalah tujuan yang akan dicapai koalisi dalam pemerintahan. Misalnya disetujui beberapa kesepakatan koalisi: pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan profesional; terjadinya reformasi birokrasi; peningkatan kualitas pelayanan publik; dan terpenuhinya hak ekonomi, sosial, dan politik masyarakat sebagai hak-hak asasi warga.

Keputusan DPD Partai Demokrat mengusung Ridho Ficardo sebagai calon gubernur Lampung tidak muncul secara tiba – tiba. Keputusan tersebut muncul setelah DPD Demokrat Provinsi Lampung melakukan survey untuk melihat karakteristik calon pemilih. Hasil survey melihat bahwa jumlah pemilih pemula pada pilukada mendatang ditahun 2014 cukup sangat besar yakni mencapai angka 1,5 juta pemilih. Para pemilih pemula tersebut rata – rata masih berusia muda. Mereka pada umumnya mengalami kejenuhan terhadap kepemimpinan daerah yang selama ini dipegang oleh golongan berusia tua. Kejenuhan tersebut mencapai titik

kolminasi dan berujung pada keinginan untuk melihat tampilnya anak muda pada posisi puncak dalam kepemimpinan daerah di provinsi Lampung. Menyikapi dinamika yang tumbuh dikalangan pemilih pemula tersebut, DPD Partai Demokrat Lampung akhirnya mengambil keputusan berani yakni mengusung tokoh muda Ridho Ficardo yang tak lain sebagai ketua DPD Partai Demokrat Lampung³.

Keputusan yang sangat berani tersebut itu diambil sebagai terobosan untuk mendinamisasi kehidupan politik di provinsi Lampung. Keputusan tersebut menyimpan resiko yang sangat tinggi terkait dengan faktor popularitas maupun pengalaman Ridho Ficardo didalam dunia pemerintahan yang masih kalah jauh dibandingkan dengan para kandidat yang lain, sosok Ridho Ficardo merupakan pendatang baru yang masih dipandang kalah dalam popularitas maupun elaktabilitas. Pilihan untuk mengusung Ridho Ficardo ini dirasakan sebagai langkah berani. Mengingat para pesaingnya merupakan politisi senior yang sebagian diantaranya tampil sebagai penguasa daerah incumben.⁴

Untuk melengkapi sisi lemah yang menjadi kekurangan Ridho Ficardo, DPD Partai Demokrat Lampung memandang perlunya mencari tokoh yang dapat mendampingi Ridho Ficardo sebagai calon gubernur. Pilihan tersebut jatuh kepada bupati Tulang Bawang Barat yakni Bachtiar Basri untuk dijadikan sebagai calon wakil gubernur mendampingi Ridho Ficardo. Keputusan untuk menjatuhkan pilihan kepada Bachtiar Basri menjadi calon wakil gubernur didasari dengan pertimbangan : (1) Bachtiar Basri telah berpengalaman di bidang pemerintahan semenjak ia menjabat menjadi

³ Wawancara pada Yusuf Kohar wakil ketua 2 DPD Demokrat Rabu, 27 Agustus 2014

⁴ Ibid

bupati di Tulangbawang Barat; (2) Usia Bachtiar Basri yang sudah cukup senior dipandang dapat melengkapi Ridho Ficardho yang masih berusia muda; (3) Sosok Bachtiar Basri dinilai memiliki kecocokan dengan Ridho Ficardo karena Bachtiar Basri merupakan seorang kader dari partai demokrat.⁵

DPD Partai Demokrat akhirnya mantap dengan keputusan untuk mengangkat Ridho – Bachtiar sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada pemilukada April 2014. Pasangan tersebut kemudian tampil dengan mengusung visi pembangunan provinsi Lampung kedepan yang diungkap dalam bentuk kalimat “Lampung sebagai provinsi terdepan dan termaju di pulau Sumatra, sejahtera, tertata rapi dengan pemerintahan yang bersih serta berjiwa memberi dan melayani” kemudia dijabarkan ke dalam berbagai bidang pembangunan meliputi : bidang infrastruktur, bidang investasi, bidang reformasi birokrasi, bidang pertanian, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Upaya tersebut kemudian dilanjutkan dengan langkah membangun koalisi. DPD Partai Demokrat Lampung memandang bahwa perolehan suara partai yang diramalkan turun pada pemilu 2014 dirasakan belum cukup untuk menompang kemenangan pasangan Ridho – Bachtiar. Untuk itu langkah penjajakan dilakukan melalui pendekatan dengan parpol lain nya yang dirasakan memiliki kedekatan dengan partai Demokrat. Pilihan untuk membangun koalisi dengan partai lainnya dirasakan lebih mudah dilakukan bila menggandeng partai PKS. Pilihan untuk menggandeng PKS dinilai strategis karena: (1) PKS telah menjadi sekutu Nasional baik pusat ataupun

⁵ Ibid

daerah yang telah dilakukan oleh DPP Demokrat dan DPP PKS pada tahun 2009; (2) harapan PKS untuk mendorong popularitas partainya bersama kenaikan popularitas Ridho Ficardho; (3) kesamaan visi – misi untuk pembangunan Lampung; (4) memberikan citra baik tidak mendukung calon yang memiliki citra baik.

Langkah pendekatan PKS mendapatkan sambutan hangat dari petinggi PKS Lampung. DPD Demokrat Lampung dan DPW PKS Lampung sepakat membangun koalisi melalui kontrak politik yang disepakati oleh ketua Demokrat Lampung dan PKS Lampung di gedung DPW PKS Lampung. Koalisi yang dibangun ke dua partai tersebut semakin besar dengan dukungan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) dengan dukungan 4 partai politik tersebut, pasangan Ridho – Bachtiar diatas kertas sudah memperoleh 34% suara parpol di DPRD Lampung.

Tidak sampai dengan membentuk koalisi partai saja namun pasangan ini juga koalisi non partai seperti PARITI (paguyuban ridho berbakti) , The Young Inspiration Group Lampung yang merupakan perkumpulan mahasiswa se- Lampung, Zigers Organizer dan Posko Garuda yang semua difokuskan bergerak untuk golongan pemuda. Koalisi non partai tersebut di backup oleh pasangan Ridho – Bakhtiar untuk pergerakan dilapangan pada saat kampanye dijadwalkan oleh KPU⁶. Semua koalisi yang tergabung dalam pergerakan Ridho – Bakhtiar didasari oleh visi – misi pasangan Ridho – Bakhtiar karena mereka percaya bahwa pasangan Ridho – Bakhtiar

⁶ Wawancara langsung oleh Tim Sukses

yang tidak memiliki kecacatan politik dapat merealisasikan semua visi – misinya.

B.1.2 Strategi Mobilisasi dana

Mobilisasi dana merupakan hal awal yang perlu dilakukan oleh setiap kandidat calon gubernur dan wakil gubernur karena dalam berkampanye memerlukan cukup banyak dana untuk membuat alat peraga dan logistik kampanye yang lain nya karena modal ekonomi memiliki makna penting sebagai “penggerak” dan “pelumas” mesin politik yang dipakai bahkan modal ekonomi dapat menjadi prasyarat utama ketika calon itu bukan berasal dari partai yang dicalonkannya.

Dalam menghadapi kampanye pasangan Ridho – Bakhtiar berhasil mengumpulkan dana kampanye sebesar Rp. 12 Miliar. Dana tersebut semakin bertambah menjadi Rp. 14 Miliar, dana sebesar itu di peroleh berkat tambahan dana dari sumbangan pribadi, dana tim kampanye, jaringan pendukung seperti koalisi partai dan barisan yang tergabung dalam tim Ridho – Bachtiar. Sesuai dengan laporan dana kampanye yang ke KPU sekitar Rp. 14 Miliar yang didapatkan oleh sumbangan dana pribadi kandidat antara Ridho – bakhtiar dengan menggunakan dana pribadinya lalu menyusul dengan dana dari tim keluarga yang dibentuk pada saat masa sebelum pembukaan pendaftaran calon yang dibuka oleh KPU Provinsi dan dana selanjutnya dana dari jaringan pendukung seperti partai koalisi dan beberapa organisasi masyarakat yang bergabung pada barisan ridho - bakhtiar sehingga dengan dana 14 miliar tersebut pasangan Ridho – Bakhtiar berhasil mengolah dana tersebut untuk menduduki posisi sebagai

gubernur Lampung⁷. Dana 14 Miliar tersebut didapatkan dari berbagai sumber seperti berikut :

Tabel 5.6
Laporan dana kampanye Ridho – Bakhtiar

No	Uraian	Rp.
	SALDO AWAL	
1	Sumber dana dari pasangan calon	931.028.576
2	Pinjaman dana talangan	800.000.000
	PENERIMAAN	
1	Sumber dana dari pasangan calon	11.000.000.000
2	Sumbangan perseorangan	1.780.437.500
3	Pinjaman Bunga Bank	7.710.437.500
	Total Penerimaan dan Saldo awal	14.519.176.375

Sumber : data diolah dari KPU

Awalnya tim Ridho – Bakhtiar tidak menargetkan dana kampanye bahkan mereka tidak menyangka bahwa dana yang dikumpulkan mencapai angka yang cukup besar. Dana – dana tersebut dikhususkan untuk logistik kampanye sampai penunjang kegiatan kampanye terbuka seperti dialog mahasiswa, petani dan buruh bahkan beberapa kesehatan gratis pun mereka lancarkan dengan dana tersebut. Dana yang berhasil dikumpulkan oleh pasangan tersebut menjadikan dana terbesar antara ke – 4 calon gubernur dan wakil gubernur seperti berikut :

Tabel 5.7
Rekapitulasi Laporan dana Kampanye

No	Nama Pasangan Calon	Dana Kampanye Rp.
1	Ir. H Berlian Tihan, MM dan Drs. H Mukhlis Basri	4.600.000.000,-
2	M Ridho Ficardo M.Si dan Bakhtiar Basri, SH, MM	14.519.176.375,-
3	Drs. Herman HN, MM dan Dr. H Zainudin Hasan MM. MH	520.000.000
4	M. Alzier Dianis T, SE dan H Lukman Hakim, SH, MM	4.000.000.000,-

Sumber : data diolah dari KPU

⁷ Hasil wawancara bersama tim pemenangan ridho berbakti

B.1.3 Membangun Jaringan Pendukung

Dalam membangun jaringan pendukung dalam konteks politik, data tentang daerah sasaran sangat penting karena bisa memberikan informasi untuk di jadikan acuan dalam menetapkan langkah-langkah kampanye, terutama dalam kaitannya dengan strategi. Pasangan Ridho Ficardo – Bakhtiar Basri memiliki strategi tersendiri yang berbeda dari beberapa calon lainnya.

Pasangan ini pun melakukan silaturahmi ke semua kelompok agama guna memperkuat jaringan massa pendukung diberbagai kelompok seperti Muhamadiyah, Nadlatul Ulama, dan berbagai kelompok agama lain baik yang Islam, Protestan, Katolik, Hindu dan Budha. Mereka semua membantu pasangan tersebut dengan pencitraan calon. Tak hanya kelompok agama aja yang didekati oleh Ridho. Ia bahkan berhasil mendekati dengan kelompok The Young Inspiration Group Lampung yang merupakan kelompok mahasiswa se- Lampung. Kelompok ini tertarik kepada Ridho karena sosok mudanya yang berani memimpin Lampung dan adanya kesamaan visi dalam tujuan untuk pembangunan Lampung 5 tahun ke depan. The young inspiation ini sendiri melakukan pendekatan kepada mahasiswa yang belum tegabung bersama mereka untuk bersedia menentukan pilihan ke Ridho – Bakhtiar. Usaha itu berhasil mengumpulkan 4000 mahasiswa di Graha Mandala untuk berdialog bersama Ridho sehingga mahasiswa yang hadir cenderung tertarik untuk mengenal sosok Ridho lebih jauh lagi.

Selain itu salah satu tokoh Lampung Bustami Zainudin mendirikan PARITI (Paguyuban Ridho Berbakhti), PARITI ini sendiri dibentuk

bertujuan untuk membuat basis dukungan untuk Ridho – Bakhtiar. PARITI sendiri melakukan kegiatan – kegiatan yang lebih banyak bersifat kesukuan seperti menonton wayangan bahkan kegiatan seni budaya lainnya yang bermaksud untuk menjaring massa tingkat kelas menengah ke bawah dan daerah perdesaan yang di mana daerah tersebut jauh dari tingkat hiburan. Beberapa kegiatan yang dilakukan pariti berhasil membuat antusias masyarakat senang karena kegiatan hiburan yang mereka buat berhasil membuat masyarakat yang melihatnya terhibur.

B.1.4 Menyusun Pesan – Pesan Kampanye

Penyusunan pesan yang bersifat persuasif memiliki sebuah proposisi, artinya setiap pesan yang di buat di harapkan akan menghasilkan perubahan. Kampanye politik berusaha mengubah pengetahuan, sikap, tingkah laku seseorang atau public terhadap kandidat atau partai yang di perkenalkan. Oleh karena itu, kegiatan komunikasi atau kampanye bertujuan untuk perubahan memerlukan keterampilan persuasi.

Dalam penyusunan pesan di sesuaikan dengan keadaan dan kondisi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang di usung. Sehingga harus menggunakan sebuah slogan yang mewakili seluruh pesan-pesan guna untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Dalam hal ini, pasangan Ridho Ficardo – Bakhtiar Basri menggunakan cara yang berbeda sesuai dengan konsep teori yang digunakan peneliti karena pasangan Ridho Ficardo – Bakhtiar Basri menggunakan konsultan politik berupa lembaga survey nasional yaitu Saiful Mujani Research and consulting (SMRC) dan Lembaga Survey Indonesia (LSI). Penggunaan konsultan politik didasari alasan bahwa visi misi pasangan harus sesuai dengan masyarakat Lampung

sesuai dengan kondisi masyarakat Lampung sampai dengan tingkat Desa. Pilihan untuk merekrut SMRC dan LSI merupakan lembaga yang kredibel sehingga tim percaya dengan hasil survey kedua lembaga antara SMRC dan LSI melihat hasil survey sebelumnya yang tepat⁸. Oleh karena itu pasangan Ridho Ficardo – Bakhtiar Basri percaya dengan hasil yang di keluarkan oleh kedua lembaga survey tersebut. SMRC dan LSI yang digunakan oleh Ridho – Bakhtiar merupakan lembaga pertama dan terpercaya melihat dari beberapa hasil survey yang dilakukan beberapa daerah.

Rancangan program kegiatan pasangan Ridho - Bachtiar juga di buat setelah melihat dari hasil survey yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut sehingga. Program – program yang dirancang dengan demikian sesuai dengan kondisi masyarakat sehingga masyarakat cenderung memilih pasangan Ridho Ficardo – Bakhtiar Basri. Dari sinilah peran lembaga survey amat berpengaruh terhadap pembuatan visi missinya. Pasangan Ridho – Bakhtiar pun akhirnya mendapatkan kenaikan elaktibilitas yang tajam karena visi missinya menyentuh masyarakat.

Program – program yang ditawarkan oleh pasangan ini terdiri dari bidang infrastruktur, bidang investasi, bidang reformasi birokrasi, bidang pertanian, bidang kesehatan dan terakhir bidang pendidikan. Penyusunan program tersebut juga di tempuh dengan melihat hasil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung serta melibatkan organisasi masyarakat yang mempunyai keterlibatan dalam proses pembangunan Provinsi Lampung. Organisasi seperti: Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Sosial, lembaga lainnya, dan bahkan sampai dengan masyarakat tingkat bawahpun dilibatkan oleh

⁸ ibid

pasangan Ridho Ficardo – Bakhtiar Basri dalam penyusunan program agar programnya sesuai dengan harapan masyarakat Lampung⁹.

B.2 Strategi Kampanye Langsung

Strategi kampanye langsung yang digunakan oleh tim Ridho – Bakhtiar pada saat jadwal kampanye yang dibuka oleh KPU Provinsi Lampung melibatkan beberapa hal yaitu strategi pergerakan partai, marketing politik dan *black campaign*.

B.2.1 Strategi Pergerakan Partai

Strategi ini melihat dari kinerja partai politik dalam memasarkan calon tersebut, sehingga kekuatan calon dapat meningkat melalui kampanye. Kampanye jangka panjang tidak dapat dilakukan sendiri, artinya suatu partai politik membutuhkan pesaing untuk memberikan energi agar dapat terus menerus memperbaiki citra dan reputasi partai.

Partai politik membutuhkan suatu perencanaan strategis dalam melakukan hubungan dengan masyarakat. Perencanaan ini menyangkut produk politik yang akan dibawakan, image yang akan dimunculkan, program kampanye yang akan dilakukan dan strategi penggalangan massanya. Perencanaan perlu dilakukan agar alokasi sumber daya (misalnya manusia, keuangan, infrastruktur) dapat dilakukan secara efisien.

Pasangan Ridho Ficardho – Bakhtiar Basri berhasil membangun jaringan pendukung dan jaringan relawan sampai di tingkat dusun / lingkungan dalam satu provinsi Lampung dan jaringan partai koalisi yang bergabung dalam koalisi Ridho BerBakti sehingga dalam pergerakan sampai di tingkat RT (rukun tetangga) menggunakan mereka tim Ridho Berbakti dan mereka

⁹ ibid

selalu di kontrol oleh tim inti keluarga sehingga mereka dapat berjalan sesuai pada rancangan strategi yang dikonsepskan oleh pasangan Ridho – Bakhtiar. Kegiatan yang mereka lakukanpun hanya sebatas memperkenalkan secara jelas pasangan Ridho – Bakhtiar, bahkan mereka membuat kelompok pengajian Ridho berbakhti untuk pasangan tersebut. Selain itu mereka juga menggunakan cara agitasi dengan tim sampai di tingkat RT dan membentuk Ridho – Bakhtiar memiliki suara yang kuat untuk menciptakan *wagon effect* (cendrung memilih yang banyak) sampai dengan penyajian sosok ridho yang muda dan pintar untuk kemasayarakat.

Dalam proses pengontrolan tim dibentuk tim tingkat dusun / lingkungan dikontrol oleh tim desa / kelurahan lalu tim desa / kelurahan di kontrol langsung oleh tim kecamatan dan tim kecamatan dikontrol langsung oleh tim kabupaten / kota yang dibawah tim penanggung jawab kemenangan Ridho – Bakhtiar¹⁰. Melihat dari kondisi tersebut terlihat sistematis dalam pengontrolan yang dibentuk oleh tim pemenangan dan terlihat jelas antara jalur konsolidasi antar tim sehingga mempermudah tim inti dalam melihat perkembangan tim yang dibawah.

Dalam strategi ini juga pasangan Ridho Ficardho – Bakhtiar Basri melakukan pembagian tugas antara partai pendukung seperti Partai Keadilan Sosial (PKS) bertugas mengumpulkan berkas – berkas yang berguna untuk pencalonan dari data – data kondisi masyarakat secara umum, hasil survey lembaga survey, sampai data jumlah daftar pemilih tetap setiap TPS se Provinsi Lampung dan juga data – data total suara setiap TPS sampai dengan pelanggaran yang terjadi dalam PILKADA tersebut. Sedangkan

¹⁰ Ibid

Partai Demokrat bertugas dalam membuat kegiatan – kegiatan politik yang terjun langsung kedalam masyarakat seperti kampanye akbar dan kegiatan – kegiatan yang melibatkan calon yang diusung oleh partai tersebut¹¹. Partai PKS dalam melakukan tugasnya telah berhasil melakukan pelatihan saksi dan real count untuk menunjang data pilkada tersebut.

Selain itu pula pasangan ini sering melakukan peninjauan langsung ke beberapa lokasi yang terpencil seperti pasar untuk melakukan dialog langsung bersama mereka agar dapat mengetahui kondisi masyarakat umum sampai dengan mengumpulkan semua golongan masyarakat di semua kabupaten / kota di Lampung hanya untuk meminta mereka menyampaikan aspirasinya sehingga Ridho – Ficardo memiliki data yang akurat dan membuat dirinya terlihat seperti sosok pemimpin yang peduli dengan rakyat dan rakyat yang berkumpul atas dasar rasa penasaran mereka terhadap sosok Ridho yang telah di pasarkan oleh tim suksesnya selain itu didalam kegiatan diaolog akbar juga Ridho menciptakan kegiatan – kegiatan yang bersifat sosial.

Kegiatan – kegiatan yang dibentuk oleh tim merupakan hasil dari survey yang dilakukan oleh lembaga survey yang menjadi konsultan politik serta kondisi sosial masyarakat umum dan data dari tim desa / kelurahan sehingga kegiatan yang dibuat banyak yang menyentuh masyarakat seperti kegiatan hiburan wayangan yang banyak digemari masyarakat bahkan kegiatan kesehatan seperti sunat massal, pengobatan gratis dan pemberian obat – obatan gratis yang berdasarkan kondisi tingkat kesehatan masyarakat¹².

¹¹ ibid

¹² ibid

B.2.2 Marketing Politik

Marketing merupakan pilihan pendekatan yang paling tepat untuk merebut hati dan suara para pemilih.¹³ Penerapan strategi-strategi bisnis dalam kehidupan politik tidak diragukan lagi dapat memberikan hasil yang maksimal dalam meraih kemenangan politik, karena orang dibiasakan dengan cara kapitalistik yaitu orang membeli barang karena iklan atau rekomendasi orang lain.

Strategi pemasaran politik pasangan Gubernur Ridho - Bakhtiar dalam pemilihan kepala daerah tahun 2014 dilakukan dalam berbagai tahapan agar strategi dapat efektif dan tepat sasaran. Dalam penelitian ini, serangkaian strategi yang dilakukan oleh pasangan tersebut dalam memasarkan muatan-muatan politik dilakukan dengan menerapkan bauran pemasaran politik (marketing politik mix). Strategi produk yang ditempuh pasangan tersebut dianalisis berdasarkan komponen produk pribadi Ridho dan Bakhtiar yaitu Ridho yang sebagai calon gubernur yang sudah mendedikasikan dirinya kepada masyarakat Lampung sebagai calon gubernur yang belum memiliki cacat politik dan calon yang termuda, sehingga tidak perlu lagi bersusah payah dalam hal mengenalkan diri ke masyarakat.

Ridho Ficardo bisa dikatakan orang baru yang belum memiliki cacat politik karena terkenal baik dan dekat dengan masyarakat, sehingga jika dia mencari pasangan wakil siapapun akan tetap menang, Sifat Ridho Ficardo yang dikenal dapat mengayomi masyarakat kecil seperti contoh Ridho Ficardo datang ke acara-acara masyarakat biasa. Sehingga dipandang

¹³Firmanzah . 2008 . *Marketing Politik – Antara Pemahaman dan Realitas* .Jakarta:Yayasan Obor Indonesia. Hal XXIII

sebagai calon yang tidak malu untuk turun ke bawah. Hal tersebut yang perlu dicontoh oleh pejabat lain dalam melakukan pendekatan ke masyarakat. Dengan adanya kedekatan ke masyarakat maka akan mempermudah program kerja yang akan disampaikan ke masyarakat jika terpilih sedangkan Bakhtiar Basri memiliki tingkat kepercayaan dalam masa pemerintahannya di kabupaten Tulang Bawang Barat dan belum terlibat dalam kasus politiknya.¹⁴

Dapat disimpulkan bahwa ketokohan seorang kandidat dalam pemilihan kepala daerah berperan sangat penting dalam perolehan jumlah suara Ridho Ficardo berangkat dari pemikiran bahwa sudah menjadi kenyataan sejarah, bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku, ras, agama, budaya dan dari keragaman itu telah lahir solidaritas nasional untuk menghadapi penjajah hingga lahirnya Negara Republik Indonesia. Manajemen keragaman itu dimungkinkan karena adanya semangat Bhineka Tunggal Ika, yakni meski ada identitas yang berbeda-beda tetapi pada hakikatnya adalah satu kesatuan yaitu kesatuan bangsa Indonesia. Hal tersebut dimanfaatkan oleh Ridho berBakti untuk mendekati diri ke masyarakat tanpa melihat status yang ada di masyarakat.

Selain itu pasangan Ridho – Bakhtiar juga menggunakan beberapa media untuk meningkatkan popularitasnya baik media cetak maupun elektronik, ia memasang iklan di semua surat kabar Lampung dan di semua saluran tv dan radio lokal bahkan ia juga memasarkan iklannya di tv nasional seperti Indosiar dan tak kalah menarik juga ia memasuki media sosial seperti twitter, facebook dll untuk memasarkan dirinya ke kalangan masyarakat

¹⁴ Hasil wawancara dengan tim keluarga ridho berbakhti pada tanggal 21 Juli 2014 di DPD Demokrat Lampung

menengah keatas dan sosok mudanya lah yang selalu ditonjolkan dalam pemasarannya serta program – program yang dibuat menarik olehnya, untuk hal tersebut ridho – bakhtiar membentuk tim tersendiri yang bergerak di media komunikasi agar terfokuskan memasarkan sosok ridho bakhtiar. Hasil dari pencitraan yang dilakukan oleh pasangan ridho – bakhtiar memiliki respon yang cukup baik sampai melebihi angka 10.000 penggemar di media facebooknya.

B.2.3 Black Campaign dan Negative Campaign

black campaign merupakan penggunaan metode rayuan yang merusak, sindiran atau rumors yang tersebar mengenai sasaran kepada para kandidat atau calon kepada masyarakat agar menimbulkan *presepsi* yang dianggap tidak etis terutama dalam hal kebijakan publik. komunikasi ini diusahakan agar menimbulkan fenomena sikap *resistensi* dari para pemilih, kampanye hitam umumnya dapat dilakukan oleh kandidat atau calon bahkan pihak lain secara efisien karena kekurangan sumber daya yang kuat untuk menyerang salah satu kandidat atau calon lain. dengan bermain pada permainan emosi para pemilih agar pada akhirnya dapat meninggalkan kandidat atau calon pilihannya.

Semenjak diumumkan menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, pasangan Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri mulai menunjukkan tanda – tanda akan mendapatkan dukungan dari pemilih muda. Besarnya dukungan yang mulai berdatangan ke pasangan Ridho – Bachtiar membuat lawan politik mulai resah. Berbagai *Negatif Campaign* dan *Black Campaign* pun mulai di luncurkan lawan – lawan politik. Isu yang di angkat terutama menuding Ridho Ficardo keturunan China atau Thiohoa, isu lainnya yang

di hembuskan menyebutkan bahwa Ridho Ficardo menjalankan politik uang dengan menyebar ratusan ton gula. *Black Campaign* dan *Negatif Campaign* di rasa dapat menurunkan elaktabilitas Ridho Ficardo tapi tak lama karena ia berhasil melakukan kenaikan elaktabilitas yang terus menerus¹⁵.

Dalam melihat isu *black campaign* ini Ridho Ficardo – Bakhtiar Basri tidak merespon isu – isu politik yang dikeluarkan oleh tim sukses lain. Menurut dia tim sukses diperintahkan cagub Ridho untuk menggelar sosialisasi ke masyarakat sesuai dengan aturan, dan tidak berada di luar aturan. Untuk itu persoalan ini pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Lampung untuk memprosesnya dan tim melakukan kegiatan – kegiatan yang sewajarnya dan dibutuhkan oleh masyarakat umum. Bahkan tak hanya isu pembagian gula yang dilontarkan oleh lawan sampai dengan isu sarapun dilibatkan sampai dengan mengatakan bahwa Ridho keturunan Cina dan di belakangnya orang Cina semua tetapi *blackcampain* tersebut tidak direspon sama sekali oleh beliau bahkan tidak sedikitpun membalas melalui *blackcampaind* dan *negatifcampaid* tetapi hanya tim yang dibawah saja yang mencoba meluruskan apa yang diisukan oleh lawan. Hal ini berdampak penurunan elaktibilitas sosok Ridho namun tetapi tidak lama hal tersebut menurun bahkan setelah disurvei kembali elaktibilitas Ridho berhasil naik kembali.

Black campaign yang dilontarkan dari tim sukses lain nya tidak dipikirkan sedemikian rupa bahkan isu – isu negatif terkadang di balas dengan kegiatan yang bersifat pembuktian terhadap *black campaign*

¹⁵ Wawancara tim sukses Levi Tuzaidi ,Rabu 27 Agustus 2014

tersebut sampai di sidang Mahkamah Konstitusi (MK) pun tidak mengeluarkan hasil yang bermasalah terhadap pasangan Ridho – Bakhtiar.

C. Penentu Kemenangan

Melihat dari strategi yang dilakukan oleh pasangan Ridho Ficardo – Bakhtiar Basri menghasilkan kemenangan seperti data berikut :

Tabel 5.8
Hasil persentase suara di DPR

No Urut.	Nama Calon	Partai Pendukung	Keterangan
1.	Berlian Tihan dan Mukhlis Basri	PDI-P, PPP dan PKB serta 5 partai Non-Parlemen	Persentase dukungan dari seluruh partai politik yang mendukung sebesar 26% berdasarkan jumlah kursi di DPR Provinsi. PDI-P : 11 Kursi PPP : 3 Kursi PKB : 5 Kursi
2.	Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri	Demokrat, PKS, PKPB dan PDK	Persentase dukungan dari seluruh partai politik yang mendukung sebesar 34% berdasarkan jumlah kursi di DPR Provinsi. Demokrat : 14 kursi PKS : 7 Kursi PKPB : 4 kursi PDK : 2 kursi
3.	Herman HN dan Zainudin Hasan	PAN serta 15 partai non parlemen	Persentase dukungan dari seluruh partai politik yang mendukung sebesar 17% berdasarkan jumlah kursi di DPR Provinsi. PAN : 7 Kursi
4.	Alzier Dianis Thabrani dan Lukman Hakim	Golkar dan Hanura	Persentase dukungan dari seluruh partai politik yang mendukung sebesar 22 % berdasarkan jumlah kursi di DPR Provinsi. Golkar : 10 Kursi Hanura : 5 kursi

Sumber hasil pleno KPU Provinsi Lampung

Sudah dapat dilihat dari data diatas bahwasan nya strategi yang dibentuk oleh pasangan Ridho Ficardo dan Bakhtiar Basri memberikan hasil yang

memuaskan melihat dari berbagai faktor seperti modal sosial, modal ekonomi dan isu program nya.

C.1 Modal Ekonomi

Modal politik dan ekonomi saling berkaitan dalam iklim politik yang menekankan kepada interaksi spontan (jarak waktu komunikasi yang pendek) antara pemilih dan calon politik. Waktu yang pendek dalam sosialisasi diri selaku calon politisi mendorong penggunaan modal ekonomi sebagai jalur pintas. Kondisi ini banyak terjadi di negara-negara berkembang yang masih dalam proses transisi menuju Pemilu rasional dan penciptaan pemilih rasional.

Pilihan publik dalam pemilihan umum pada perspektif politik dan ekonomi adalah proses dimana preference individu dikombinasikan ke dalam keputusan kolektif. Perbedaannya dalam perspektif politik, maka dalam perspektif ekonomi, konsep pilihan publik dalam pemilihan umum merupakan transformasi dari ekonomi klasik yang secara sederhana.

Kandidat memerlukan dukungan ekonomi selain dari kandidat juga berasal dari aktor-aktor ekonomi untuk kemenangan pilkada dalam pembiayaan semua kegiatan politik kandidat. Menurut Sahdan dan Haboddin bahwa Proses politik pilkada membutuhkan biaya/ongkos yang sangat mahal. Hal ini menyebabkan tantangan bagi proses perkembangan demokrasi lokal, karena kandidat yang bertarung adalah para pemilik uang/modal yang besar. Mahalnya ongkos pilkada dapat disebabkan oleh 3 (tiga) faktor, yaitu¹⁶ : (1) Pasangan calon kepala daerah yang akan bertarung diharuskan membeli partai politik sebagai kendaraan politik. Partai politik

¹⁶ Marijan, Kacung. 2006. Demokratisasi di Daerah: Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung. Eureka, Surabaya Hal 56

yang akan dijadikan kendaraan dalam pilkada mengharuskan pasangan calon untuk menyeter danaa sumbangan hingga miliaran rupiah, (2) Model kampanye politik yang dilakukan oleh pasangan calon membutuhkan banyak biaya. Misalnya, buat poster, pemasangan iklan di media massa baik cetak maupun elektronika, (3) Untuk membujuk pemilih biasanya menggunakan praktek politik uang. Model pemberian uang kepada pemilih biasanya dilakukan hampir pada setiap proses pentahapan pilkada. Peredaran uang yang paling menonjol pada saat kampanye pasangan kandidat dan menjelang pemungutan suara.

Modal ekonomi yang dikumpulkan untuk kampanye Ridho Ficardo dikumpulkan dari berbagai macam sumbangan sehingga mencapai 14 Miliar Rupiah dan dana tersebut digunakan untuk memodali kegiatan – kegiatan sekala kecil maupun besar untuk membantu mempermudah kegiatannya sehingga kegiatan yang menyentuh masyarakatpun dapat dirasakan dengan baik oleh masyarakat seperti kegiatan ke daerah – daerah untuk mengadakan wayangan agar menyentuh masyarakat yang memiliki citra rasa terhadap nilai budaya bahkan mengadakan pertemuan mahasiswa seLampung untuk berdialog agar mengetahui kondisi pemerintahan melalui padangan mahasiswa langsung.

Modal sebesar itu sudah cukup untuk memberikan kegiatan kampanye karena modal 14 Miliar merupakan program yang cukup besar dibanding calon – calon gubernur yang lain. Namun terdapat beberapa indikasi yang melibatkan perusahaan untuk memompang dana kampanye Ridho – Bakhtiar seperti keterlibatan Vice Presiden PT Sugar Grup Companies (SGC) yaitu Lee Purwati dalam beberapa kampanye Ridho – Bakhtiar

bahkan sampai blusukan yang dilakukan oleh Ridho ke pasar Unit 2 Tulang Bawang pun melibatkan dia sehingga ada keterlibatan kepentingan sugar grup terhadap pencalonan ridho – bakhtiar dan ada keterlibatan bantuan dana yang diberikan sugar grup terhadap pencalonan ridho – bakhtiar yang mungkin tidak tercover dalam data di KPU.

Seperti yang di jelaskan oleh salah satu tim pemenangan Herman – Zainudin bahwa Ridho bisa mengalahkan Herman yang sudah jelas memiliki bukti nyata di bidang pembangunan dapat dikalahkan oleh Ridho karena masalah transaksional. Kemenangan Ridho dipengaruhi oleh kondisi masyarakat yang miskin sehingga Ridho yang diprediksi memiliki dana sebesar 1 triliun dapat membeli suara baik secara barang sembako sampai pembagian uang. Hal ini yang tidak tercover oleh BAWASLU sehingga Ridho bisa mendapatkan suara yang cukup tinggi sehingga Herman tidak bisa memenangkan pilkada jika Herman memiliki dana yang serupa pasti Herman akan duduk di kursi gubernur Lampung.¹⁷

Kegiatan – kegiatan yang besar juga dilakukan oleh pasangan ini sampai dengan kegiatan yang selalu mengundang artis besar dan bagi – bagi survenir ke masyarakat umum sedangkan calon lain tidak ada satupun yang melakukan hal tersebut bahkan pasangan ini pernah melakukan kurban sapi sebanyak 315 ekor sapi untuk dibagikan kemasyarakat. Oleh karena itu masyarakat lebih banyak mengenal ridho daripada calon yang lain karena kegiatan yang dia lakukan rutin dan selalu ada dourprise dalam setiap kegiatan disitulah masyarakat terpancing untuk mendatangi kegiatan yang dilakukan oleh tim suksesnya. Didalam pemilihan gubernur Lampung juga

¹⁷ Wawancara oleh Arianto, SH. M.Si. tim kemenangan Herman - Zainudin

terjadinya pemilihan umum Legislatif yang sering terjadi money politik oleh calon anggota legislatif.

Sempat diduga pasangan ini membagikan sembako berupa gula dan uang kepada masyarakat umum karena ada beberapa masyarakat yang mendapatkan nya bahkan akomodasi saksi dari setiap calon hanya calon ridho – bakhtiar yang diberikan cukup banyak sehingga hal tersebut memompang kinerja anggota tim nya karena faktor pragmatis yang besar sering terjadi dalam pemilu. Sudah jelas terlihat bahwa faktor utama pendukung salah satu kemenangan ridho – bakhtiar didukung oleh modal ekonominya yang cukup banyak dibanding calon yang lain. Modal ekonomi yang dimanfaatkan oleh kedua pasangan ini berhasil meningkatkan popularitas mereka dengan cara menghibur masyarakat melalui kegiatan yang besar.

C.2 Modal Sosial

Modal sosial adalah bangunan relasi dan kepercayaan (trust) yang dimiliki oleh pasangan calon dengan masyarakat yang memilihnya¹⁸. Termasuk di dalamnya adalah sejauhmana pasangan calon itu mampu meyakinkan para pemilih bahwa mereka itu memiliki kompetensi untuk memimpin daerah. Agar bisa meyakinkan para pemilih, para calon harus dikenal luas oleh masyarakat. Kepercayaan tidak tumbuh begitu saja. Ia didahului oleh adanya perkenalan. Popularitas saja kurang bermakna tanpa ditindaklanjuti oleh adanya kepercayaan. Melalui modal sosial yang dimiliki, para kandidat tidak hanya dikenal oleh para pemilih tetapi juga

¹⁸ Seligman, 1997; Fukuyama, 2006

masyarakat memberi penilaian terhadap diri kandidat untuk kemudian diberi kepercayaan.¹⁹

Ridho Ficardo memiliki modal sosial yang cukup baik karena Ridho Ficardo sendiri merupakan ketua Partai Demokrat yang merupakan partai pemenang pemilu tahun 2009 sebagai ketua partai besar Ridho Ficardo memiliki sikap politik yang memadai. Hubungan emosional yang kuat dengan pendekatan kemanusiaan dan kebudayaan menguatkan eksistensi pasangan Ridho dan Bakhtiar. Ridho dikenal dekat dengan semua lapisan masyarakat, hal itu yang membuat terbentuknya ikatan emosional antara Ridho dengan masyarakat, sehingga masyarakat tetap memilihnya hal tersebut dibuktikan dengan perolehan suara menang di 12 kabupaten / kota padahal ridho belum pernah terlihat jejak rekam nya dalam memimpin suatu daerah. sedangkan Bakhtiar adalah orang yang dianggap mempunyai jiwa kepemimpinan yang berwibawa sudah terbukti dengan kemampuan nya dalam memimpin kabupaten Tulang Bawang Barat peningkatan kemajuan masyarakat Tubabar menjadikan faktor pendukung citra baik untuk Bakhtiar sendiri.

Ridho merupakan tokoh yang populer di mata masyarakat. Ridho telah menginvestasikan dirinya selama beberapa tahun terakhir untuk benar-benar mampu menarik simpati masyarakat. Hal itu bisa dilihat dari aktivitasnya sebagai ketua partai besar serta calon gubernur yang tidak sungkan-sungkan mendatangi setiap acara yang digelar masyarakat, mulai acara pesta sampai dengan kerumunan masyarakat yang berduka tertimpa musibah. Apa yang dilakukan tersebut dapat dikatakan berhasil dalam menarik simpati

¹⁹Marijan, Kacung. 2006. Demokratisasi di Daerah: Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung. Eureka, Surabaya Hal 35

masyarakat Lampung untuk menyukainya²⁰. Melihat dari berbagai macam data bahwa pasangan Ridho – Bakhtiar memiliki kesamaan dalam berbagai macam pencitraan dan bahkan ada beberapa calon yang memiliki tingkat modal sosial yang tinggi melihat sosok Herman HN yang sudah jelas – jelas melakukan pembangunan yang nyata di mata masyarakat dan belum adanya keterlibatan Herman HN dalam kasus pidana. Dapat dilihat bahwa faktor modal sosial bukan menjadikan pasangan Ridho – Bakhtiar menang dalam pemilihan gubernur Lampung tahun 2014.

C.3 Isu Program

Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Kepala Daerah dirumuskan berdasarkan selera (*tastes*) dari masyarakat, demikian pula implementasinya, sebagaimana sering dikemukakan oleh para pendukung kebijakan desentralisasi (*Rondinely*). Keinginan tersebut diterjemahkan ke dalam program populis Program Pembukaan lapangan kerja, Penanganan kriminalitas dan masalah social, Komitmen terhadap pendidikan, Gender dan perlindungan anak, Lingkungan hidup, Pembangunan infrastruktur (jalan, listrik, telephon seluler dll), Penanganan stabilitas ketersediaan dan pengendalian harga kebutuhan masyarakat dan lain-lain.

Ridho Ficardo berhasil merumuskan program – program yang dibutuhkan oleh masyarakat Lampung setelah melihat hasil survey lembaga survey dan diskusi publik dengan berbagai golongan masyarakat sehingga program – program Ridho Ficardo terlampir dalam visi – misi nya sebagai berikut ;

²⁰ Hasil Wawancara dengan Tim pemenangan Ridho Ficardo pada tanggal 22 Juli 2014

VISI:

lampung sebagai provinsi terdepan dan termaju di pulau sumatra, sejahtera, tertata rapi dengan pemerintahan yang bersih serta berjiwa memberi dan melayani.

MISI dan Program :

A. bidang infrastruktur

- a) menyediakan infrastruktur jalan dan jembatan di seluruh lampung untuk memperlancar roda perekonomian rakyat.
- b) membentuk tim khusus yang bertugas memantau kondisi jalan di seluruh lampung dan bertindak cepat untuk melakukan perbaikan.
- c) fokus pada jalan-jalan utama yang menjadi jalur distribusi kebutuhan pokok sehingga pasokan tidak terhambat dan harga tetap stabil.
- d) meningkatkan kualitas dan lebar jalan provinsi yang menghubungkan dengan sumatra selatan dan jalur penyebrangan menuju pulau jawa.
- e) membangun jalan alternatif untuk mengurangi tingkat kemacetan.
- f) memperbaiki infrastruktur di pedesaan, daerah terisolir / tertinggal, sentra produksi, dan kawasan pertumbuhan baru.
- g) membangun bandarandan pelabuhan laut yang berstandar internasional.
- h) meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan telekomunikasi dan listrik.

B. bidang investasi

- a) sistem perizinan yang cepat, mudah, dan murah
- b) menciptakan iklim berinvestasi yang kondusif dengan memberikan kemudahan perizinan bagi investor-investor baru (cepat, mudah dan murah) sehingga akan menciptakan banyak lapangan kerja, mengurangi angka pengangguran, meningkatkan kesejahteraan dan mengikis kriminalitas.
- c) memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum sehingga investor dapat terus mengembangkan usahanya dan ikut memajukan perekonomian lampung.

- d) memberikan informasi potensi peluang usaha dan memfasilitasi kemitraan yang diinginkan oleh dunia usaha.

C. bidang reformasi birokrasi

- a) pemerintahan yang bersih, transparan, profesional dan berjiwa memberi dan melayani.
- b) mempercepat dan memperpendek waktu pengurusan izin dan mempermudah birokrasi.
- c) menyelenggarakan sistem pelayanan publik berlandaskan prinsip *good governance* menuju budaya pelayanan prima yang cepat, tepat dan berkualitas.
- d) menciptakan tata pemerintahan dan mekanisme hubungan antara pemerintah kabupaten atau kota dan provinsi demi terselenggaranya pembangunan yang terintegratif, efektif dan efisien.
- e) mendukung dan memfasilitasi penyelesaian sengketa hukum.
- f) menyempurnakan sitem dan regulasi hukum daerah lampung.
- g) membina kesadaran hukum dengan pendekatan keagamaan dan sosial budaya.

D. Bidang pertanian

- a) membangun infrastruktur pendukung pertanian dan mengembangkan kawasan sentra komoditas unggulan pertanian untuk mencapai swasembada dan ketahanan pangan daerah.
- b) membangun sarana dan prasarana irigasi, normalisasi saluran air dan bendungan, reklamasi rawa untuk cadangan pangan, dan membangun tanggul penahan pada daerah rawan banjir.
- c) membantu peminjaman modal pertanian dengan bunga rendah.
- d) penguatan produktivitas ukmk dalam ekonomi kerakyatan berbasis agroindustri-agrobisnis strategis termasuk didalamnya perlindungan terhadap pasar tradisional.
- e) peningkatan peran serta usaha kecil mikro, usaha menengah, dan koperasi dalam pengembangan berbagai jenis usaha.
- f) fasilitasi dan pengembangan jaringan pemasaran bagi industri manufaktur, perdagangan dan jasa.

- g) merevitalisasi dan mengembangkan kawasan sentra komoditas unggulan pertanian dan peternakan, antara lain:
- a. sentra sapi: lampung tengah, lampung selatan, tulang bawang, lampung utara.
 - b. sentra kambing: tanggamus, lampung selatan, tulang bawang barat.
 - c. sentra ubi kayu: tulang bawang, lampung tengah, lampung timur, lampung utara, way kanan.
 - d. sentra padi: lampung tengah, lampung selatan, lampung utara, lampung timur, tulang bawang, tanggamus, pesawaran.
 - e. sentra jagung: lampung timur, lampung tengah, lampung selatan.
 - f. sentra hortikultura: tanggamus, lampung barat, pringsewu.
 - g. sentra karet: tulang bawang, lampung tengah, lampung utara, way kanan, tulang bawang barat, mesuji.
 - h. sentra kelapa sawit: tulang bawang, tulang bawang barat, lampung tengah, lampung utara, way kanan, mesuji.
 - i. sentra kopi: lampung barat, tanggamus, lampung utara.
 - j. sentra lada: lampung utara, lampung timur.
 - k. sentra coklat: lampung tengah, tanggamus, lampung timur.
 - l. sentra penangkapan ikan: lampung selatan, bandar lampung, tanggamus, tulang bawang, lampung timur, pesisir barat.
 - m. sentra budidaya perikanan darat: tanggamus, pringsewu, lampung tengah, lampung timur, lampung utara, metro, bandar lampung.

E. bidang kesehatan

- a) *meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan mempermudah birokrasi.*
- b) mempermudah serta memperpendek jalur birokrasi pelayanan kesehatan yang berlaku di rumah sakit pemerintah dan pembayarannya ditanggung oleh pemerintah.
- c) pendirian dan peningkatan fasilitas rumah sakit untuk mengurangi overload pasien di rumah sakit daerah.

- d) peningkatan bantuan, infrastruktur, pelayanan puskesmas dan rumah sakit di kabupaten atau kota.
- e) memberi bantuan operasional biaya kesehatan gratis untuk keluarga miskin.

F. bidang pendidikan

- a) *meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan melestarikan budaya daerah lampung.*
- b) melaksanakan amanat undang-undang dengan mengimplementasikan pendidikan gratis 12 tahun dan disertai dengan pengawasan materi pendidikan dan kualitas guru.
- c) memfasilitasi dan memperbaiki infrastruktur pendidikan dasar, menengah dan atas, madrasah dan pondok pesantren.
- d) program beasiswa bagi siswa yang kurang mampu.
- e) pengembangan sekolah kejuruan khususnya yang berbasis agri bisnis yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia dan memajukan daerah lampung.
- f) membina kegiatan kepemudaan, pendidikan ekstrakurikuler, dan kepramukaan.
- g) melestarikan dan mengembangkan budaya daerah lampung melalui pembangunan pusat-pusat kebudayaan dan penyelenggaraan event-event budaya yang menjadi pendukung utama pariwisata serta daya tarik bagi masyarakat lokal maupun internasional untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dari melihat visi – misi serta program yang di keluarkan Ridho Ficardo terlihat dapat menjawab kondisi Lampung yang mendudukin tingkat ke 2 termiskin setelah Provinsi Aceh untuk meningkatkan kualitas masyarakat Lampung namun tetapi pasangan lainpun menawarkan program – program nyata dan unggulannya tetapi tidak semua program tersebut sampai kesetiap golongan masyarakat bahkan program yang dilontarkan oleh Herman HN

memberikan keyakinan yang cukup untuk masyarakat karena ia melampirkan hasil kerjanya sebagai walikota Bandar Lampung.

Oleh karena itu Ridho Ficardo dalam melakukan kampanye melalui program – program nya belum terlalu signifikan untuk membantu nya mendapatkan posisi gubernur Lampung, bahkan program yang ditawarkan oleh masing masing calon memiliki kesamaan yaitu untuk membangun Provinsi Lampung yang lebih baik pada dasar nya.

D. Analisis data

Pada *subpoint* ini peneliti akan membahas terkait hasil penelitian mengenai analisis kemenangan Ridho - Bachtiar dalam pemilihan gubernur Lampung 2014 yang terdapat pada *subpoint* sebelumnya, dengan menyesuaikannya dengan teori-teori yang berada di dalam literature.

D.1 Proses Penyelenggaraan Pilgub Lampung 2014

Pilkada Lampung yang telah dilaksanakan serentak dengan pemilihan legislatif awalnya mengundang banyak kekhawatiran terkait keberhasilan pilgub Lampung yang berbarengan dengan pemilihan legislatif namun pada kenyataannya proses pilgub ini berhasil sesuai harapan KPU Lampung. Pelaksanaan pilkada langsung lahir merupakan koreksi terhadap pelaksanaan pilkada melalui perwakilan (oleh DPRD) sebagaimana pernah di amanatkan UU No. 22 Tahun 1999. Koreksi ini semakin ketara dengan di implementasikan payung hukum pelaksanaan pilkada langsung, yakni UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Kemudian di perbaiki melalui undang – undang No. 12 tahun 2008.

Sesuai dengan ketentuan undang – undang dan peraturan pemerintah, tahapan pilkada secara langsung dibagi menjadi 2 tahap. Pertama tahap

persiapan dan kedua tahap pelaksanaan²¹. Tahap pertama meliputi : (i) Tahap DPRD memberitahukan kepada KPUD maupun kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Sehingga melihat dari masa jabatan gubernur sebelumnya Sjachroedin Z.P seharusnya habis pada tahun 2013 melihat dari masa jabatannya dari 2009 – 2013 sehingga seharusnya pilkada Lampung dilaksanakan pada tahun 2013 namun pada kenyataannya pemerintah daerah yang menganggarkan dana pilkada tidak menyetujui keputusan KPU Lampung dalam melaksanakan Pilkada tahun 2013. Loby – loby politikpun terjadi antara KPU Lampung dan Pemerintah daerah namun akan tetapi tetap tidak disetujui oleh pemerintah daerah untuk pelaksanaan pada tahun 2013. Melihat hal ini proses pelaksanaan pilgub tidak hanya di tahap teknis namun bersifat politis sehingga terjadi kompromi antara pemerintah daerah dengan KPU Lampung. (ii) KPUD dengan pemberitahuan dimaksud menetapkan rencana penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang meliputi penetapan tatacara dan jadwal tahapan pilkada dari membentuk panitia pemilihan kecamatan (PPK) sampai kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Proses kompromi antara KPU Lampung dan Pemerintah Lampung menghasilkan titik temu untuk menetapkan tanggal Pilkada yaitu pada tanggal 9 April 2014 yang berbarengan dengan pemilihan Legislatif dengan tujuan untuk menghemat dana. Sehingga para komisioner KPU Lampung juga tidaklah hanya memahami kondisi teknis pelaksanaan namun harus memahami kondisi politik seperti yang terjadi silang pendapat antara KPU Lampung dengan pemerintah daerah. KPU Lampung yang mengacu pada

²¹ Leo Agustino. 2009. Pilkada dan Dinamika Politik Lokal. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hal 81

keputusan MenDagri untuk melaksanakan pada tahun 2013 , namun titik tengah kompromi yaitu pada tahun 2014.

Tahap *kedua*, tahap pelaksanaan yang meliputi tahap pelaksanaan penetapan daftar pilih, pengumuman pendaftaran, penetapan daftar calon, kampanye, masa tenang, penghitungan suara, penetapan pasangan calon terpilih, dan sampai di level pelantikan gubernur terpilih. Dalam proses penetapan terjadi sedikit konflik antara KPU Lampung dan Pemerintah provinsi sehingga membuat salah satu calon mengundurkan dirinya sebagai calon gubernur dan berakhir pada 4 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Lampung saja yang mulanya 5 pasangan. Melihat hasil proses pelaksanaan pilkada Lampung menghasilkan pasangan Ridho – Bachtiar unggul dalam pemilihan kepala daerah Lampung meskipun pihak kompetitor Herman HN melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi namun gugatan nya ditolak berdasarkan keputusan MK pada nomor : 8/PHPU.D-XII/2014 yang berisi penolakan terhadap gugatan yang dilakukan pihak kompetitor.

D.2 Strategi Pemenangan

Kondisi masyarakat lampung yang notabennya di isi oleh masyarakat muda berhasil menjadikan Ridho sebagai gubernur Lampung dan menarik simpati masyarakat muda. Sosok Ridho yang berhasil dikemas oleh Partai Demokrat menjadikan ia daya tarik yang memiliki nilai tawar yang cukup untuk menjadikan beberapa organisasi baik partai sampai ditingkat mahasiswa untuk bergabung dengan tim Ridho berBakti. Tokoh – tokoh politik yang cenderung merupakan tokoh lama dalam dunia perpolitikan menjadikan masyarakat kurang cenderung untuk memilihnya karena melihat

kondisi provinsi Lampung yang tidak mengalami kemajuan oleh tokoh – tokoh politik lama.

Dalam membangun koalisi itu sangat diperlukan untuk memenangkan pilkada karena semakin banyak koalisi yang di bangun dapat membentuk tim yang sangat banyak karena dalam ranah politik dan pemerintahan, koalisi mengacu kepada hubungan kerja sama antara dua atau lebih kekuatan atau partai politik yang berbeda, untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dan dilakukan untuk suatu jangka waktu tertentu. Sebuah koalisi bisa berarti sebuah gabungan beberapa negara yang dibentuk untuk tujuan tertentu. Koalisi bisa juga merujuk pada sekelompok orang/warganegara yang bergabung karena tujuan yang serupa.²²

Kondisi Provinsi Lampung yang memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi menjadikan masyarakat Lampung yang bersifat transaksional. Hal tersebut memberikan peluang yang besar untuk calon kepala daerah yang memiliki modal kampanye yang besar. Kondisi politik transaksional ini menjadikan pasangan Ridho – Bachtiar yang memiliki dana kampanye yang besar terlihat dari dana kampanye yang dilaporkan ke KPU dan hasil pengamatan dari pihak kompetitor.

Masyarakat Lampung yang tidak memiliki pemahaman terhadap politik sehingga ini dimanfaatkan oleh elit politik untuk menggunakan suara mereka untuk mencapai kemenangan pemilu. Banyak hal terjadi dalam kondisi perpolitikan di Lampung sehingga ada sekelompok masyarakat yang menggunakan spanduk dengan tulisan “desa kami siap menerima serangan

²² <http://id.wikipedia.org/wiki/Koalisi> (diakses pada 15 juni 2014)

fajar” dengan hal tersebut sudah jelas bahwa kondisi politik Lampung di pengaruhi oleh politik transaksional.

Berdasarkan hasil pemikiran yang dilahirkan oleh para pemikir Frankfurt School yang notabene berasal dari kalangan Marxisme, mengungkapkan teori menarik bahwa dunia politik adalah panggung transaksional antara kepentingan ekonomi (bisnis) dan politik (kekuasaan). Bahwa puncak kesuksesan politik adalah mampu meraih kekuasaan dan mampu meraup pundi-pundi ekonomi yang dapat menyejahterakan para politikus dan kelompoknya²³. Dalam perkembangan terakhir ini, politik transaksional sebenarnya mengalami perkembangan pengertian lebih luas. Transaksional tidak hanya dimaknai jual beli atau tukar menukar, melainkan penilaian terhadap Visi, Misi dan Program kerja yang ditawarkan kepada masyarakat sebagai konsep pembangunan lima tahun mendatang²⁴.

Dalam berkampanye tidak ada kampanye yang kuat tanpa rencana yang baik, dan tidak ada rencana yang kuat tanpa pesan yang baik. Penyusunan pesan yang bersifat persuasif memiliki sebuah proposisi, artinya setiap pesan yang di buat di harapkan akan menghasilkan perubahan. Kampanye politik berusaha mengubah pengetahuan, sikap, tingkah laku seseorang atau public terhadap kandidat atau partai yang di perkenalkan. Oleh karena itu, kegiatan komunikasi atau kampanye bertujuan untuk perubahan memerlukan keterampilan persuasi. Dalam penyusunan pesan di sesuaikan dengan keadaan dan kondisi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang di usung. Sehingga harus menggunakan sebuah slogan yang mewakili

²³ <http://budisansblog.blogspot.com/2013/02/politik-transaksional.html> (diakses pada 18 Desember 2014)

²⁴ <http://transaksional.blogspot.com/2010/09/politik-transaksional.html> (diakses pada 18 Desember 2014)

seluruh pesan-pesan guna untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Pesan-pesan berbentuk slogan yang mereka buat mereka sampaikan kepada masyarakat dengan penuh keyakinan bahwa begini lah ke depannya bila masyarakat kembali memilih kami, kami akan mentuntaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat.²⁵

Untuk menyusun pesan kampanye dibutuhkan konsultan yang berkaitan dalam membentuk opini masyarakat, sehingga akan terjadi politik pencitraan calon kandidat. Kondisi masyarakat Lampung yang belum memiliki pemahaman terkait politik membuat ketidak pahaman terkait sosok calon mereka hanya melihat program yang ditawarkan apabila program itu menarik membuat mereka tertarik untuk memilihnya tanpa melihat jejak rekam setiap calon. Pembentukan opini yang dilakukan oleh calon mempengaruhi masyarakat Lampung sehingga calon yang berhasil memiliki program yang menarik akan mendapat simpatik masyarakat itu sendiri.

Menurut Firmanzah,²⁶ *political marketing* adalah konsep permanen yang harus di lakukan terus menerus oleh sebuah partai politik atau kontestan dalam membangun kepercayaan dan *image public*. Membangun kepercayaan ini hanya biasa dilakukan melalui hubungan jangka panjang, tidak hanya pada masa kampanye. Political marketing harus di lihat secara komprehensif, yang meliputi : *pertama* Political marketing lebih daripada lebih daripada sekedar komunikasi politik. *Kedua* Political marketing di aplikasikan dalam seluruh proses organisasi partai politik. Tidak hanya

²⁵ Arifin, Anwar. 2003. Komunikasi Politik; Paradigma Teori Aplikasi Strategi Dan Komunikasi Politik Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Hal 122

²⁶ Firmanzah . 2008 . *Marketing Politik – Antara Pemahaman dan Realitas* Jakarta:Yayasan Obor Indonesia Hal 156

tentang kampanye politik tetapi juga sampai pada tahap bagaimana memformulasikan produk politik tetapi juga sampai pada tahap bagaimana memformulasikan produk politik melalui pembangunan symbol, image, idiologi, dan program yang ditawarkan. *Ketiga* Political marketing menggunakan konsep marketing secara luas, tidak hanya terbatas pada teknik marketing, namun juga sampai pada strategi marketing, dari teknik publikasi, menawarkan ide dan program, dan program dan desain produk sampai ke market intelligent serta pemrosesan informasi. *Keempat* Political marketing melibatkan banyak disiplin ilmu dalam pembahasannya, seperti sosiologi dan psikologi. Produk politik merupakan fungsi dari pemahaman sosiologis mengenai symbol dan identitas, sedangkan faktor psikologisnya adalah kedekatan emosional dan karakter seorang pemimpin, sampai ke aspek rasionalitas idiologi partai. Kedua hal tersebut saling berkaitan sehingga menghasilkan political marketing yang berkaitan. *Kelima* Political marketing biasa diterapkan dalam berbagai situasi politik, mulai dari proses pemilihan umum sampai ke proses lobi di parlemen.

Politik berbasis ikatan primordial masih di pandang sebagai magnet yang memiliki daya pikat yang kuat dalam proses kontestasi politik di daerah. Masyarakat pemilih masih terikat kuat atas dasar ikatan tradisional. Untuk mengemas sosok yang bisa diterima oleh berbagai golongan biasanya harus melihat kondisi etnis dalam suatu daerah sehingga kemas Ridho – Bachtiar berhasil menarik simpati beberapa golongan besar dalam Provinsi Lampung. Suatu daerah yang masih memiliki sifat primordial biasanya mudah untuk dimasuki oleh suatu calon apabila calon memiliki kesamaan dalam hal etnis.

Lawan politik dari pasangan Ridho – Bachtiar mencoba mendegradasi pasangan ini dengan isu *money* politik. Isu tersebut dijadikan pasangan ini sebagai senjata untuk menurunkan popularitas pasangan ini sehingga elaktabilitas pasangan ini menjadi turun. Tidak hanya mencari simpati masyarakat saja dalam proses pemilihan gubernur Lampung namun dengan cara saling melontarkan isu politik yang masih di anggap berguna untuk menurunkan elaktabilitas. Hal ini dianggap masih berguna melihat kondisi masyarakat yang notaben-nya masih mudah di pengaruhi ini karena tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah.

Biasanya lawan melakukan hal ini juga dengan tertutup. Hebatnya ini adalah model *black campaign* yang sistematis. Kelompok lawan akan berupaya menyusupkan “orang dari timnya” masuk ke kubu lawan. Bila si penyusup sudah masuk maka dia akan berupaya membuat sesuatu yang merugikan kelompok yang disusupi. Seringkali pernyataan yang keluar justru kontraproduktif, misalnya membuat pernyataan yang membuat pemilih marah, benci dan kehilangan simpati. Hal ini tentu akan merugikan kelompok yang disusupi dengan merusak citra. Tetapi yang pasti dari semua pola kampanye itu sangat sulit dibuktikan “pelaku intelektual” dibalik serangan tendensius dan negatif itu.²⁷ .

D.3 Penentu Kemenangan

Pemilukada secara langsung biasanya perlu mengeluarkan banyak biaya dan ongkos yang harus dikeluarkan oleh kandidat. Kemampuan untuk

²⁷ <http://www.leadership-park.com/new/more-about-u/black-campaign.html>

membayai pengeluaran tersebut bervariasi di antara para kandidat, namun kemampuan atau modal ekonomi setiap calon pun berbeda – beda. Untuk itu masing – masing kandidat berupaya kapasitas financial lebih besar. Para kandidat yang berlatar belakang pengusaha tentu memiliki kemampuan lebih tinggi dalam modal ekonominya. Fenomena kandidat yang berlatar belakang pengusaha lebih banyak memiliki modal ekonomi dari pada yang bukan pengusaha.

Masalah financial itu merupakan masalah yang cukup besar. Sehingga hal tersebut di tempuh dengan menggandeng *kapitalis* lokal untuk membantu membiayai calon. Melihat dari calon gubernur yang terpilih Ridho Ficardo merupakan *interpreneur*, namun setelah melihat peta kekuatan financialnya yang dimiliki oleh setiap calon sehingga membuat Ridho melakukan hal pragmatis dengan menggandeng kapitalis lokal. Atas dasar ini Ridho menjalin kerjasama dengan Lee Purwati yang merupakan Vice President Sugar Group. Hal ini yang menjadikan modal financial Ridho mencukupi dengan bantuan dana dari kapitalis lokal sehingga terjadi kontrak politik yang dilakukan oleh Ridho terhadap kapitalis lokal yang berhasil membantu pembiayaan Ridho dalam pilgub Lampung dan melihat dari modal kampanye yang dilaporkan KPU Lampung modal financial Ridho merupakan modal terbesar dari setiap pasangan calon. Seperti yang diungkapkan oleh tim sukses dari kompetitor yang mengatakan bahwa kemenangan Ridho ditempuh dengan hal pragmatis, sehingga dalam proses pemilihan kepala daerah penting mengumpulkan dana kampanye itu sangat lah penting karena dengan banyaknya biaya kampanye calon akan dapat menaikkan popularitas dengan kegiatan – kegiatan yang memakan banyak

biaya karena modal politik dan ekonomi saling berkaitan dalam iklim politik yang menekankan kepada interaksi spontan (jarak waktu komunikasi yang pendek) antara pemilih dan calon politik. Waktu yang pendek dalam sosialisasi diri selaku calon politisi mendorong penggunaan modal ekonomi sebagai jalur pintas. Kondisi ini banyak terjadi di negara-negara berkembang yang masih dalam proses transisi menuju Pemilu rasional dan penciptaan pemilih rasional. Pilihan publik dalam pemilihan umum pada perspektif politik dan ekonomi adalah proses dimana preference individu dikombinasikan ke dalam keputusan kolektif. Perbedaannya dalam perspektif politik, maka dalam perspektif ekonomi, konsep pilihan publik dalam pemilihan umum merupakan transformasi dari ekonomi klasik yang secara sederhana.

Kandidat memerlukan dukungan ekonomi selain dari kandidat juga berasal dari aktor-aktor ekonomi untuk pemenangan pilkada dalam pembiayaan semua kegiatan politik kandidat. Menurut Sahdan dan Haboddin bahwa Proses politik pilkada membutuhkan biaya/ongkos yang sangat mahal. Hal ini menyebabkan tantangan bagi proses perkembangan demokrasi lokal, karena kandidat yang bertarung adalah para pemilik uang/modal yang besar. Mahalnya ongkos pilkada dapat disebabkan oleh 3 (tiga) faktor, yaitu²⁸ : (1) Pasangan calon kepala daerah yang akan bertarung diharuskan membeli partai politik sebagai kendaraan politik. Partai politik yang akan dijadikan kendaraan dalam pilkada mengharuskan pasangan calon untuk menyeter danaa sumbangan hingga miliaran rupiah, (2) Model kampanye politik yang dilakukan oleh pasangan calon membutuhkan

²⁸ Marijan, Kacung. 2006. Demokratisasi di Daerah: Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung. Eureka, Surabaya Hal 56

banyak biaya. Misalnya, buat poster, pemasangan iklan di media massa baik cetak maupun elektronika, (3) Untuk membujuk pemilih biasanya menggunakan praktek politik uang. Model pemberian uang kepada pemilih biasanya dilakukan hampir pada setiap proses pentahapan pilkada. Peredaran uang yang paling menonjol pada saat kampanye pasangan kandidat dan menjelang pemungutan suara.

Takhanya modal ekonomi saja yang dimiliki oleh pasangan Ridho – Bactiar namun koalisi berbasis etnispun dilakukan karena struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua cirinya yang unik, yaitu (1) secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan sukubangsa, agama, adat, serta perbedaan-perbedaan kedaerahan. Sedangkan (2) secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Perbedaan-perbedaan sukubangsa, agama, adat, dan kedaerahan seringkali disebut sebagai ciri masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk, suatu istilah yang mula-mula dikenalkan oleh Furnivall untuk menggambarkan masyarakat Indonesia pada masa Hindia Belanda. Konsep masyarakat majemuk sebagaimana yang digunakan oleh ahli-ahli ilmu kemasyarakatan dewasa ini memang merupakan perluasan dari konsep Furnivall tersebut. Masyarakat Indonesia pada masa Hindia Belanda, demikianlah menurut Furnivall, merupakan suatu masyarakat majemuk (*plural society*), yakni suatu masyarakat yang

terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam kesatuan politik²⁹.

Masyarakat Lampung yang bersifat homogen menjadikan strategi setiap pasangan calon tidak mengesampingkan adanya faktor ikatan primordial ditengah masyarakat, khusus di Lampung perkembangan politik pasca orde baru atmosfir politik lampung amat kuat dipengaruhi oleh ke 2 etnis yaitu etnis Jawa dan Lampung. Hal itu dipengaruhi pola koalisi yang ditempuh oleh para kandidat. Kandidat yang beretnis jawa berpasangan dengan calon beretnis Lampung dan sebaliknya yang berasal dari etnis Lampung berpasangan dengan etnis Jawa. Gabungan dari kedua etnis tersebut menjadikan senjata untuk memenangkan pilkada. Atas dasar ini kemudian komposisi para kandidat duet etnis Jawa dan Lampung. Hal ini tampak di antaranya pasangan Ridho – Bachtiar yang Ridho merupakan etnis jawa dan Bachtiar merupakan etnis Lampung, hal yang sama dilakukan oleh calon lain.

Pola koalisi berbasis etnis pada kenyataannya ditempuh oleh beberapa kandidat. Namun faktanya dilapangan menunjukkan bahwa pola koalisi yang sama tersebut memberikan efek yang berbeda dari setiap kandidat. Pasangan Alzier – Lukman yang merupakan perpaduan antara 2 etnis Lampung dan Jawa mendapatkan perolehan suara dengan urutan terkecil. Namun pada faktanya kalaborasi pasangan Ridho – Bachtiar lebih berhasil karena mereka tidak hanya menyatukan koalisi antara 2 etnis namu mereka juga melakukan kegiatan yang bersifat kultural hal ini terlihat dari beberapa kegiatan wayangan dan begawi adat di tiap – tiap daerah. Hal serupa itu tidak

²⁹ JS Furnivall, *Netherlands India: A Study of Plural Economy*, Cambridge at The University Press, 1967, halaman 446-469

dilakukan oleh pasangan Alzier dan Lukman Hakim walaupun mereka berhasil meyatukan koalisi 2 etnis tetapi tidak dapat menyentuh masyarakat yang masih kental dengan isu primordialnya, untuk itu selain koalisi bersifat etnis namun harus melaksanakan kegiatan yang bersifat kultural dan ini yang membuat koalisi etnis Ridho – Bachtiar berhasil.